

## SKRIPSI

### **TANGGUNG GUGAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999**

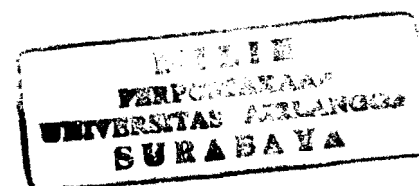


Per 140 /05  
Kur  
t

**OLEH**

**DEBY RATNA KURNIAWATI**  
**NIM. 030111064 U**

**MINAT HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**TANGGUNG GUGAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



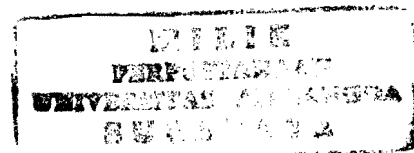
**Lisman Iskandar, S.H., MS.**  
**NIP. 130 675 526**

**Penyusun**



**Deby Ratna Kurniawati**  
**NIM. 030111064 U**

**MINAT HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana pada bab-bab tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kontrak konstruksi pada hakekatnya menganut prinsip eksistensi hubungan kontraktual yakni hanya mengikat para pihak yang menandatangani. Kontrak konstruksi pada pelaksanaan kerja konstruksi hanya mengikat pihak *owner* dengan pihak kontraktor sebagaimana kedua belah pihaklah yang menandatangani kontrak konstruksi. Begitu banyaknya tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi tersebut mempunyai hubungan hukum sendiri dengan pihak *owner* dan kontraktor dengan dibuat kontrak melakukan pekerjaan hubungan hukum antara tenaga kerja konstruksi dengan kontraktor adalah hubungan kontraktual. Pada hubungan kontraktual ini mengikat para pihak seperti yang tertuang dalam kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak tersebut. Adapula tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada penyedia jasa dan pengguna jasa sebagai pegawai sehingga hubungan hukumnya adalah hubungan perburuhan.

- b. Tanggung gugat atas kegagalan bangunan dapat dikenakan pada kontraktor dan tenaga kerja konstruksi. Bentuk tanggung gugat kontraktor atas kegagalan bangunan dapat berupa :
- Tanggung gugat secara wanprestasi;
  - Tanggung gugat secara perbuatan melanggar hukum;
  - Selain itu kontraktor dibebani tanggung gugat atas kegagalan bangunan yang ditimbulkan tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada kontraktor.

Tanggung gugat tenaga kerja konstruksi yang mempunyai hubungan perburuhan didasarkan pada tanggung gugat profesional, yang berupa sanksi administratif dan sanksi profesi. Sedangkan pada tenaga kerja konstruksi yang mempunyai hubungan kontraktual, tanggung gugat didasarkan tidak hanya pada tanggung gugat profesional, tetapi juga dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.

## 2. Saran

- a. Perlu penegasan mengenai hubungan hukum tenaga kerja konstruksi yang bekerja melaksanakan pekerjaan pada bidang konstruksi khususnya hubungan hukum tenaga kerja konstruksi dengan kontraktor harus dipertegas apakah tenaga ahli tersebut mempunyai hubungan hukum kontraktual atau hubungan hukum perburuhan dengan kontraktor. Dengan adanya kejelasan mengenai



hukum tersebut akan mudah untuk mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung gugat yang dapat dikenakan pada tenaga kerja konstruksi tersebut.

- b. Seharusnya tenaga kerja konstruksi dapat dikenakan tanggung gugat atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh mereka, karena dalam kontrak konstruksi salah satu isinya menyebutkan kualifikasi, sertifikat dan klasifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi jika terjadi kegagalan bangunan dan hasil penilaian penilai ahli, siapa dan pada bidang apa tenaga kerja konstruksi menimbulkan kegagalan bangunan langsung dimintai pertanggung gugatan. Khususnya tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada kontraktor. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang tanggung gugat profesi yaitu perlu kiranya aturan tanggung gugat tadi dibuat secara tersendiri tidak digabungkan dengan aturan yang mengatur secara umum. Hal demikian guna penghematan waktu pengenaan tanggung gugat tidak melalui kontraktor dulu.